

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang cukup signifikan dibuktikan dengan tingkat perekonomian yang tumbuh hingga 5-6 % dan di wujudkan dengan pembangunan di wilayah yang strategis. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan partisipatif memerlukan upaya dan langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan harkat dan martabatnya serta

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005:111). Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan dikomunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani yang dapat menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Harapan peningkatan efektivitas sebagai penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia muncul seiring peluncuran PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan

Kecamatan (PKK) sebagai suatu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Visi PNPM Mandiri Pedesaan sendiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya

Usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi: (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. (2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. (3) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha

yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. (4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Kecamatan Jombang, apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan atau tidak.

Menurut data publikasi MENKOKESRA (2008) menyatakan bahwa upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui berbagai strategi : (1) bantuan pada Bansos (BLT, Raskin), (2) Bantuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PNMPN Mandiri Pedesaan), (3) Bantuan pada UMKM untuk kemandirian masyarakat (KUR, KUBE). Salah satu bantuan yang paling menyita perhatian adalah program pemberdayaan masyarakat yang terhimpun dalam satu naungan program PNPM Mandiri Pedesaan. Pengelolaan keuangan untuk dana bergulir dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mana terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana PNPM yaitu terjadi kemacetan kredit pada penyaluran ekonomi bergulir atau simpan pinjam.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dengan adanya kesepakatan antara kreditor dengan penerima kredit (debitur) sesuai dengan janji yang telah dibuatnya (Kasmir, 2014:85).” Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang

dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Kasmir, 2014:85). Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

“Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang diperjanjikan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462).” Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayarannya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472) terdiri dari faktor eksternal bank dan internal bank. Faktor eksternal bank terdiri dari: (1) adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan. (2) adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. (3) kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. (4) musibah (kebakaran,

bencana alam) atau kegagalan usaha. Faktor internal bank terdiri dari : (1) kurang adanya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola kredit. (2) tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. (3) pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. (4) lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya tentang kredit juga telah dilakukan oleh Triana Nurhayati (2011) yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan”. Setelah dilakukan analisis dan uji statistik dengan menggunakan T-test, diperoleh hasil bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program PNPM berbeda secara nyata dan meningkat secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima kredit dari koperasi untuk pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo berbeda secara nyata. Penelitian sejenis lainnya juga telah dilakukan oleh Ayu Linda Marcelina (2012) yang berjudul “Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Koperasi Enkas Mulia, Semarang Tahun 2012). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa variabel perkembangan usaha dalam penelitiannya yang mencakup pendapatan usaha, dan Omzet Penjualan usaha sebelum dan sesudah mendapat kredit dari koperasi mengalami perbedaan secara signifikan. Ini terbukti setelah dilakukan perhitungan menggunakan uji T yaitu terlihat bahwa t hitung (2.553) > t tabel (2.145), yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat di simpulkan bahwa

pengambilan kredit koperasi sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dalam PNPM Mandiri Pedesaan karena selama ini hanya didasarkan atas laporan-laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam konteks Pembangunan Wilayah dan Pedesaan penting dilakukan karena salah satu tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terciptanya sebuah kondisi yang lebih baik. Dari fenomena tersebut maka penulis perlu mengadakan penelitian mengenai ;

“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Kegiatan Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi uraian masalah antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang manajemen keuangan khususnya manajemen simpan pinjam.
2. Faktor-faktor penyebab kredit macet yang berasal dari internal dan eksternal.
3. Tempat penelitian adalah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
4. Responden penelitian adalah pengurus dan kelompok simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kredit macet pada kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana gambaran kemampuan pengembalian kredit simpan pinjam di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
3. Seberapa besar dampak kredit macet terhadap keberlangsungan kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan data dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada kegiatan simpan pinjam PNPM Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui gambaran kemampuan pengembalian kredit simpan pinjam di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dampak kredit macet terhadap keberlangsungan kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan antara lain:

1. Berguna secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan teori, khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan

dengan kredit macet di kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

2. Berguna secara praktisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran atau informasi yang lebih riil, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kredit macet di kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
3. Berguna bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kredit macet di kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Program Sarjana Strata 1), di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Widya Gama” Lumajang.

